



BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 65 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Garut dan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut, Pemerintah Daerah telah menetapkan Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja oleh Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dalam rangka mendorong terwujudnya pemerintahan yang berorientasi pada hasil, maka Peraturan Bupati Garut sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Garut tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3854) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Perberdahaaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi, Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Pasal 2 ayat (2) huruf f dan Pasal 23 Peraturan Daerah kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 39);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Garut tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2010 Nomor 4);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2011 Nomor 7);
20. Pasal 2 ayat (2) huruf g, Pasal 22E, dan Pasal 22F Peraturan Daerah Kabupaten garut Nomor 8 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 24 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Inspektorat Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 8);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 3);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);
24. Peraturan Bupati Garut Nomor 27 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014-2019.**

Pasal I

Ketentuan Lampiran I dan II Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut Tahun 2014-2019 (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 75) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Garut Nomor 82 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Garut Nomor 705 Tahun 2014 tentang Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut (Berita Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 82) diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan II Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 03 - 11 - 2017
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 03 - 11 - 2017
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,**

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 65 TAHUN 2017**

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 - 2019

NO	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN INDIKATOR	SKPD PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5	6
MISI 1 : Meningkatkan Tata Kelola Pelayanan Pendidikan dan Kesehatan yang Berkualitas, Terjangkau, Prima Untuk Mewujudkan Kehidupan Masyarakat Bermartabat dan Agamis.					
1	meningkatnya akses dan tingkat pendidikan masyarakat	a. rata-rata lama sekolah	tahun	kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan. Indikator rata-rata lama sekolah dihitung dengan menggunakan dua variabel secara simultan yaitu tingkat kelas yang sedang/pernah dijalani dan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan.	Dinas Pendidikan
		b. harapan lama sekolah	tahun	lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Harapan lama sekolah dihitung untuk penduduk berusia 7 tahun ke atas.	Dinas Pendidikan
2	meningkatnya harapan hidup masyarakat	a. angka harapan hidup	tahun	rata-rata jumlah tahun hidup yang dapat dijalani oleh seseorang hingga akhir hayatnya. Sumber data Badan Pusat Statistik.	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
3	terkendalinya pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP)	%	(jumlah penduduk tahun perhitungan dikurangi jumlah penduduk tahun sebelumnya) dibagi jumlah penduduk tahun sebelumnya) x 100%	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
4	meningkatnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan	a. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) b. Indeks Pembangunan Gender (IPG)	%	<p>indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi.</p> <p>mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender.</p>	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
5	meningkatnya penanganan masalah kesejahteraan sosial	persentase penduduk miskin	%	(jumlah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per bulan di bawah garis kemiskinan dibagi jumlah penduduk) x 100%. Garis Kemiskinan menggambarkan batas kecukupan pengeluaran/konsumsi yang direfleksikan melalui besaran rupiah minimal yang dikeluarkan untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan nonmakanan. Sumber Data Badan Pusat Statistik.	Dinas Sosial
6	meningkatnya kesempatan kerja	tingkat pengangguran terbuka	%	perbandingan antara banyaknya orang yang mencari pekerjaan dalam jangka waktu tertentu, baik yang sudah pernah bekerja maupun belum pernah bekerja terhadap angkatan kerja.	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

1	2	3	4	5	6
MISI 2 : Mewujudkan Kemandirian Ekonomi Masyarakat Berbasis Potensi Lokal					
7	meningkatnya pendapatan masyarakat	pendapatan perkapita per tahun	%	hasil bagi pendapatan regional dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Sumber data Badan Pusat Statistik.	Dinas Pertanian; Dinas Perernakan dan Kelautan; dan Dinas Ketahanan Pangan
8	berkembangnya pariwisata berbasis kearifan lokal	jumlah kunjungan wisata	juta orang	jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek pariwisata dalam satu tahun	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
9	meningkatnya nilai investasi daerah	prosentase peningkatan realisasi investasi daerah	%	(jumlah realisasi investasi tahun perhitungan dikurangi Jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya) dibagi jumlah realisasi investasi tahun sebelumnya x 100%	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
MISI 3 : Mewujudkan Kualitas Infrastruktur yang Memadai Serta Lingkungan yang Sehat, Aman dan Nyaman					
10	meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur jalan yang memadai	prosentase jalan Kabupaten mantap (baik dan sedang)	%	(panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik dan sedang dibagi total panjang jalan kabupaten) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
11	meningkatnya kualitas prasarana dasar pemukiman dan perumahan yang sehat dan nyaman	a. menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	unit	jumlah rumah tidak layak huni dalam satu tahun tertentu	Dinas Perumahan dan Permukiman
		b. cakupan rumah tinggal bersanitasi	%	(jumlah rumah tinggal bersanitasi dibagi jumlah rumah tinggal) x 100%	Dinas Perumahan dan Permukiman
		c. prosentase cakupan air minum perkotaan	%	(jumlah penduduk pengguna air minum di perkotaan dibagi jumlah penduduk perkotaan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		d. prosentase cakupan air bersih perdesaan	%	(jumlah penduduk pengguna air bersih di perdesaan dibagi jumlah penduduk perdesaan) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1	2	3	4	5	6
12.	meningkatkan pengendalian pemanfaatan ruang	prosentase kesesuaian pemanfaatan ruang	%	(luas wilayah yang sesuai tata ruang dibagi luas wilayah) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
13.	meningkatkan pengelolaan irigasi, konservasi dan pengendalian banjir	tingkat kemandapan jaringan irigasi teknis Kabupaten	%	persentase jaringan irigasi teknis Kabupaten dalam kondisi mantap	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
14.	meningkatkan kualitas lingkungan hidup	a. Tingkat pelayanan sampah (%) b. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	% point	tingkat pelayanan sampah (<i>Level of Service</i>) = (daya angkut sampah dibagi Volume timbulan sampah wilayah pelayanan x 100%) mencerminkan kondisi kualitas air, udara dan lahan dengan rumus IKLH = (IPA X 30%) + (IPU X 30%) + (ITH X 40%) Catatan : IPA = Indeks Pencemaran Air IPU = Indeks Pencemaran Udara ITH = Indeks Tutupan Lahan	Dinas Lingkungan Hidup
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Profesional Amanah serta Membangun Kehidupan Sosial Politik yang Demokratis dan Berbudaya Luhur.					
15.	terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik dan bersih	a. predikat penilaian SAKIP Kabupaten b. predikat penilaian LPPD Kabupaten c. opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	predikat SAKIP predikat LPPD Opini BPK	predikat penilaian SAKIP Kabupaten predikat penilaian LPPD Kabupaten opini BPK atas laporan keuangan Pemerintah Daerah	Inspektorat/Bappeda/ Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah Bagian Administrasi pada Sekretariat Daerah Badan Keuangan dan Aset Daerah

1	2	3	4	5	6
		d. prosentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam satu tahun	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	5	6
		d. prosentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam satu tahun	Bagian Organisasi pada Sekretariat Daerah

BUPATI GARUT,



RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	5	6
		d. prosentase peningkatan Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam satu tahun	Bagian Organisasi Sekretariat Daerah

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 65 TAHUN 2017
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
BUPATI GARUT NOMOR 705 TAHUN 2014
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014-2019

INDIKATOR KINERJA UTAMA SATUAN KERJA KERJA PEMERINTAH DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN GARUT TAHUN 2014 - 2019

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SATUAN	FORMULASI/CARA PENGUKURAN	KETERANGAN/KRITERIA
1	2	3	4	5	6
DINAS PENDIDIKAN					
1.	meningkatkan pemerataan akses pendidikan jenjang pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	a. angka partisipasi kasar PAUD b. angka partisipasi murni SD c. angka partisipasi murni SMP	% % %	$(\text{jumlah siswa}) / (\text{jumlah penduduk usia 2-6 tahun}) \times 100\%$ $(\text{jumlah siswa usia 7-12 tahun}) / (\text{jumlah penduduk usia 7-12 tahun}) \times 100\%$ $(\text{jumlah siswa usia 13-15 tahun}) / (\text{jumlah penduduk usia 13-15 tahun}) \times 100\%$	Bidang Paud Dikmas Bidang Sekolah Dasar Bidang Sekolah Menengah Pertama Bidang Paud Dikmas
2.	meningkatkan penduduk usia 25 tahun ke atas yang menuntaskan pendidikannya hingga setara SMA	penurunan penduduk usia 25 tahun ke atas yang belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA	%	$(\text{jumlah lulusan pendidikan kesetaraan paket C tahun berjalan}) / (\text{jumlah penduduk belum menuntaskan pendidikan hingga setara SMA Usia 25 Tahun ke atas}) \times 100\%$	Bidang Paud Dikmas
3.	meningkatkan mutu pendidikan	a. persentase PAUD terakreditasi minimal B b. rata-rata nilai ujian SD	% angka	$(\text{jumlah FAUD terakreditasi minimal B}) / (\text{Jumlah PAUD}) \times 100\%$ $(\text{jumlah nilai ujian}) / (\text{jumlah peserta ujian}) \times 100\%$	Bidang Paud Dikmas Bidang Sekolah Dasar

1	2	3	4	5	6
		c. rata-rata nilai ujian SMP	angka	(jumlah nilai ujian)/(jumlah peserta ujian) x 100%	Bidang Sekolah Menengah Pertama
		d. persentase lembaga pendidikan masyarakat terakreditasi minimal B	%	(jumlah lembaga terakreditasi minimal B)/(jumlah lembaga) x 100%	Bidang Paud Dikmas
4.	meningkatkan mutu tenaga pendidik dan kependidikan	a. persentase guru yang bersertifikat pendidik	%	(jumlah guru mencapai sertifikasi)/(jumlah guru) x 100%	Bidang Data Ketenagaan
		b. persentase kepala sekolah yang bersertifikat	%	(jumlah kepala sekolah mencapai sertifikasi)/(jumlah kepala sekolah) x 100%	Bidang Data Ketenagaan
		c. persentase pengawas yang bersertifikat	%	(jumlah pengawas mencapai sertifikasi)/(jumlah pengawas) x 100%	Bidang Data Ketenagaan
DINAS KESEHATAN					
1.	meningkatkan pelayanan kesehatan pada ibu, bayi, balita dan kelompok masyarakat beresiko	a. persentase pelayanan kesehatan pada ibu hamil	%	jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan K4 di fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah dan swasta dibagi jumlah semua ibu hamil (sasaran) x 100 %	Dinas Kesehatan
		b. persentase pelayanan kesehatan pada ibu bersalin dan fasilitas kesehatan	%	jumlah ibu bersalin yang mendapatkan pelayanan persalinan sesuai standar di fasilitas kesehatan dibagi jumlah semua ibu bersalin (sasaran) x 100 %	Dinas Kesehatan
		c. persentase pelayanan kesehatan pada bayi baru lahir	%	jumlah bayi baru lahir usia 0 - 28 hari yang mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir sesuai dengan standar dibagi jumlah semua bayi baru lahir di wilayah Kabupaten kali 100 %	Dinas Kesehatan
		d. persentase pelayanan kesehatan pada gizi buruk	%	jumlah balita gizi buruk dibagi dengan jumlah balita seluruhnya x 100 %	Dinas Kesehatan
2.	meningkatkan penyehatan lingkungan	persentase jumlah Desa ODF	%	jumlah Desa yang ODF dibagi dengan jumlah semua Desa x 100 %	Dinas Kesehatan

1	2	3	4	5	6
3.	meningkatkan pencegahan dan pengendalian penyakit menular	persentase UCI	%	jumlah Desa yang tercapai UCI dibagi jumlah semua Desa x 100 %	Dinas Kesehatan
4.	meningkatkan perilaku hidup bersih dan sehat	persentase Desa Siaga aktif	%	jumlah Desa Siaga yang aktif dibandingkan dengan jumlah Desa Siaga yang dibentuk x 100 %	
5.	meningkatkan fasilitas pelayanan kesehatan	a. jumlah status Puskesmas TTP menjadi DTP b. jumlah Status Puskesmas Pembantu menjadi Puskesmas	jumlah	jumlah Puskesmas tanpa tempat perawatan yang berubah status menjadi Puskesmas dengan tempat perawatan jumlah Puskesmas Pembantu yang berubah status menjadi Puskesmas tanpa perawatan	Dinas Kesehatan Dinas Kesehatan
6.	meningkatkan prosentase pelayanan kefarmasian	persentase ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan	%	jumlah obat yang terpenuhi dibagi jumlah obat sesuai standar x 100 %	Dinas Kesehatan
7.	meningkatkan indeks kepuasan masyarakat	nilai IKM di Puskesmas dan Dinas Kesehatan	angka	hasil rekapitulasi <i>quisioner</i> tentang pelayanan publik	Dinas Kesehatan
8.	meningkatkan kualitas dan kompetensi sumber daya manusia kesehatan	persentase SDM yang memiliki izin praktek	%	jumlah SDM yang memiliki izin praktek di bagi dengan jumlah sasaran semua tenaga kesehatan x 100 %	Dinas Kesehatan
9.	meningkatkan jumlah Puskesmas terakreditasi	status Puskesmas terakreditasi -Dasar 4/5,9% -Madya 5/7,46%	jumlah	hasil penilaian tim surveryor yang dibuktikan dengan pemberian sertifikat akreditasi	Dinas Kesehatan
DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK					
1.	meningkatkan pelayanan dan akuntabilitas kinerja	nilai evaluasi SAKIP	kategori	nilai hasil evaluasi AKIP oleh Inspektorat	Sekretariat
2.	menurunnya angka kelahiran	angka Total Fertility Rate (TFR)	%	rata-rata jumlah anak yang dilahirkan seorang perempuan	Bidang Berencana Keluarga

1	2	3	4	5	6
3.	meningkatkan kesejahteraan keluarga	persentase tahapan keluarga pra KS berbanding jumlah keluarga	%	jumlah keluarga pra sejahtera dibagi jumlah Keluarga x 100	Bidang Sejahtera Keluarga
4.	tersedianya data dan Informasi Kependudukan KB dan PPPA	persentase Kecamatan yang mempunyai data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan PPPA	%	jumlah Kecamatan yang mempunyai data dibagi jumlah seluruh Kecamatan x 100	Bidang Pengendalian Penduduk
5.	meningkatkan kualitas hidup dan peran perempuan dalam berbagai bidang pembangunan	a. Indeks Pembangunan Gender (IPG) b. Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	poin	mengukur tingkat pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM, yaitu harapan hidup, tingkat pendidikan, dan pendapatan namun dengan memperhitungkan ketimpangan gender indeks yang digunakan untuk mengkaji lebih jauh peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik. Dimensi dari IDG mencakup partisipasi	Bidang Pemberdayaan Perempuan
6	Meningkatnya pemenuhan hak anak	persentase kepedulian masyarakat terhadap pemenuhan hak anak	poin	Jumlah Masyarakat yang memberikan bantuan dibagi Seluruh Jumlah Masyarakat x 100%	Bidang Pemberdayaan Perlindungan Anak
DINAS SOSIAL					
1.	meningkatnya pemberdayaan dan akses pelayanan sosial dalam Penanganan Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS)	jumlah PMKS yang ditangani mampu melaksanakan peran sosial, memiliki kemandirian ekonomi dalam usaha kesejahteraan sosial	orang	jumlah fakir miskin KAT dan PMKS yang mendapat bantuan	Dinas Sosial
2.	meningkatnya kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial Petensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS)	jumlah potensi sumber kesejahteraan sosial yang aktif menyelenggarakan pelayanan kesejahteraan sosial	keluarga	jumlah keluarga yang memiliki Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang mendapat bantuan rehabilitasi rumah	Bidang Sosial Pemberdayaan

1	2	3	4	5	6
1.	meningkatkan produktivitas dan unggulannya tanaman pangan, hortikultura, dan perkebunan				
	a. produksi padi		ton	jumlah produksi padi dalam setahun	Dinas Pertanian
	b. produksi jagung		ton	jumlah produksi jagung dalam setahun	Dinas Pertanian
	c. produksi kedelai		ton	jumlah produksi kedelai dalam setahun	Dinas Pertanian
	d. produksi kacang tanah		ton	jumlah produksi kacang tanah dalam setahun	Dinas Pertanian
	e. produksi ubi kayu		ton	jumlah produksi ubi kayu dalam setahun	Dinas Pertanian
	f. produksi ubi jalar		ton	jumlah produksi ubi jalar dalam setahun	Dinas Pertanian
	g. produksi cabai		ton	jumlah produksi cabai besar dalam setahun	Dinas Pertanian
	h. produksi bawang merah		ton	jumlah produksi bawang merah dalam setahun	Dinas Pertanian
	i. produksi kentang		ton	jumlah produksi kentang dalam setahun	Dinas Pertanian
	j. produksi kubis		ton	jumlah produksi kubis dalam setahun	Dinas Pertanian
	k. produksi tomat		Ton	jumlah produksi tomat dalam setahun	Dinas Pertanian
	l. produksi jahe		Ton	jumlah produksi jahe dalam setahun	Dinas Pertanian
	m. produksi kunyit		Ton	jumlah produksi kunyit dalam setahun	Dinas Pertanian
	n. produksi kapolaga		Ton	jumlah produksi kapolaga dalam setahun	Dinas Pertanian
	o. produksi jeruk		Ton	jumlah produksi jeruk dalam setahun	Dinas Pertanian
	p. produksi pisang		Ton	jumlah produksi pisang dalam setahun	Dinas Pertanian
	q. produksi alpukat		Ton	jumlah produksi alpukat dalam setahun	Dinas Pertanian
	r. produksi stroberi		Ton	jumlah produksi stroberi dalam setahun	Dinas Pertanian
	s. produksi mawar		Ton	jumlah produksi mawar dalam setahun	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6
		t. produksi sedap malam	ton	jumlah produksi sedap malam dalam setahun	Dinas Pertanian
		u. produksi krisan	ton	jumlah produksi krisan dalam setahun	Dinas Pertanian
		v. produksi mahrit	ton	jumlah produksi mahrit dalam setahun	Dinas Pertanian
		w. produksi hebras	ton	jumlah produksi hebras dalam setahun	Dinas Pertanian
		x. produksi kopi	ton	jumlah produksi kopi dalam setahun	Dinas Pertanian
		y. produksi karet	ton	jumlah produksi karet dalam setahun	Dinas Pertanian
		z. produksi teh	ton	jumlah produksi teh dalam setahun	Dinas Pertanian
		aa. produksi akarwangi	ton	jumlah produksi akarwangi dalam setahun	Dinas Pertanian
		bb. produksi tembakau	ton	jumlah produksi tembakau dalam setahun	Dinas Pertanian
		cc. produksi cengkeh	ton	jumlah produksi cengkeh dalam setahun	Dinas Pertanian
		dd. produksi nilam	ton	jumlah produksi nilam dalam setahun	Dinas Pertanian
		ee. produksi lada	ton	jumlah produksi lada dalam setahun	Dinas Pertanian
		ff. produksi kemiri sunan	ton	jumlah produksi kemiri sunan dalam setahun	Dinas Pertanian
2.	meningkatkan nilai tambah dan daya saing produksi hasil pertanian tanamanan pangan, hortikultura dan perkebunan	a. produksi produk olahan hasil tanaman pangan	ton	jumlah produk olahan hasil tanaman pangan dalam setahun	Dinas Pertanian
		b. produksi produk olahan hasil hortikultura	ton	jumlah produk olahan hasil hortikultura dalam setahun	Dinas Pertanian
		c. produksi produk olahan hasil perkebunan	ton	jumlah produk olahan hasil perkebunan dalam setahun	Dinas Pertanian

1	2	3	4	5	6
3.	meningkatnya pendapatan keluarga petani tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	a. prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani tanaman pangan per tahun b. prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani hortikultura per tahun c. prosentase peningkatan pendapatan keluarga petani perkebunan per tahun d. prosentase penurunan petani miskin	% % % %	mengukur tingkat kesejahteraan petani mengukur tingkat kesejahteraan petani mengukur tingkat kesejahteraan petani mengukur tingkat kesejahteraan petani	Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian Dinas Pertanian
DINAS KETAHANAN PANGAN					
1.	meningkatnya kualitas dan kuantitas konsumsi pangan, serta tingkat keamanan pangan	skor Pola Pangan Harapan (PPH)	point	menilai jumlah dan komposisi atau ketersediaan pangan	Bidang Konsumsi dan Pengankaragaman Pangan. Bidang Keamanan Pangan
DINAS PETERNAKAN PERIKANAN DAN KELAUTAN					
1.	meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil perikanan	a. produksi perikanan budidaya b. produksi perikanan tangkap c. peningkatan pendapatan pada kelompok perikanan budidaya dan nelayan binaan	ton ton %	jumlah produksi hasil perikanan budidaya (kolam dan sawah ikan) dalam satu tahun jumlah produksi perikanan tangkap (laut, sungai, danau/situ) dalam satu tahun peningkatan pendapatan pada kelompok binaan dengan membandingkan rata-rata pendapatan tahun ini dibanding rata-rata pendapatan tahun sebelumnya	Bidang Perikanan Budidaya Bidang Perikanan Tangkap Bidang Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap
2.	meningkatnya produksi dan nilai tambah hasil peternakan	a. produksi daging b. produksi telur	ton ton	jumlah produksi daging dalam satu tahun jumlah produksi telur dalam satu tahun	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan

1	2	3	4	5	6
		c. produksi susu d. peningkatan pendapatan pada kelompok peternak binaan	ribu liter %	jumlah produksi susu dalam satu tahun peningkatan pendapatan pada kelompok binaan dengan membandingkan rata-rata pendapatan tahun ini dibanding rata-rata pendapatan tahun sebelumnya	Bidang Peternakan dan Bidang Kesehatan Hewan Bidang Peternakan
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA					
1.	meningkatnya kunjungan wisata	jumlah kunjungan wisata (juta orang)	orang	jumlah wisatawan yang berkunjung pada objek pariwisata dalam satu tahun	Bidang Kepariwisata dan Bidang Pemasaran
2.	meningkatnya pelestarian dan pengembangan budaya daerah	persentase seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan	%	jumlah seni budaya yang dilestarikan dan dikembangkan dibagi jumlah seni budaya seluruhnya x 100	Bidang Kebudayaan dan Bidang Kesenian
DINAS KOPERASI DAN UMKM					
1.	meningkatkan kuantitas dan kualitas Koperasi yang aktif dan sehat	a. prosentase Koperasi aktif b. prosentase Koperasi sehat	% %	(jumlah Koperasi aktif dibagi jumlah koperasi) x 100% dalam satu tahun tertentu (jumlah Koperasi sehat dibagi jumlah koperasi) x 100% dalam satu tahun tertentu	Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM
2.	meningkatkan jumlah pelaku, keterampilan dan pengembangan pasar UMKM	a. jumlah wirausaha baru b. jumlah usaha mikro yang aktif	orang orang	(jumlah wirausaha baru : jumlah Koperasi) x 100% (jumlah usaha mikro aktif : jumlah Koperasi) x 100%	Koperasi dan UMKM Koperasi dan UMKM
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIJINAN TERPADU					
1.	meningkatnya nilai PMA dan PMDN	a. laju pertumbuhan minat PMA dan PMDN b. laju pertumbuhan realisasi PMA dan PMDN	% %	(nilai minat PMA dan PMDN tahun dihitung dikurangi nilai minat PMA dan PMDN tahun sebelumnya di bagi nilai realisasi investasi tahun sebelumnya) x 100% nilai minat PMA dan PMDN tahun dihitung dikurangi nilai minat PMA dan PMDN tahun sebelumnya di bagi nilai realisasi investasi tahun sebelumnya) x 100%	Bidang Pengembangan dan Promosi Penanamar. Modal Bidang Pengendalian Penanaman Modal

1	2	3	4	5	6
3.	meningkatkan kualitas infrastruktur sumber daya air	a. persentase kemandapan jaringan irigasi teknis b. persentase kemandapan situ pada kawasan konservasi dan pengembangan SDA c. persentase kemandapan situ pada kawasan konservasi dan pengembangan SDA d. persentase tingkat kemandapan saluran drainase perkotaan pada kawasan konservasi dan pengembangan SDA e. persentase tingkat kemandapan sub DAS pada kawasan konservasi dan pengembangan SDA	%	panjang saluran irigasi teknis dalam kondisi baik dibagi total panjang saluran irigasi Teknis x 100 (panjang saluran irigasi teknis yang baik : total panjang saluran irigasi teknis) x 100% (jumlah situ dalam kondisi baik : jumlah total situ) x 100% (panjang saluran drainase dalam kondisi baik : jumlah total panjang saluran drainase) x 100% (panjang saluran drainase dalam kondisi baik : jumlah total panjang saluran drainase) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
7.	Meningkatnya Kualitas bangunan gedung	persentase bangunan gedung yang layak teknis dan administrasi	%	(jumlah bangunan gedung yang layak teknis dan adm : total bangunan gedung) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
8.	Meningkatnya kepatuhan terhadap tata ruang	persentase kesesuaian pemanfaatan ruang terhadap rencana tata ruang	%	(luas wilayah yang penggunaannya sesuai tata ruang : total luas wilayah yang seharusnya berdasarkan tata ruang) x 100%	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN					
1.	Meningkatnya Kualitas Prasarana Sarana dan Utilitas Perumahan dan Permukiman yang sehat dan nyaman	a. persentase jalan lingkungan perumahan dan permukiman dalam kondisi baik b. persentase drainase di wilayah perkotaan dan pedesaan (Km) dalam kondisi baik	%	panjang jalan lingkungan perumahan dan permukiman yang terbangun panjang drainase di wilayah perkotaan dan pedesaan yang terbangun	Dinas Perumahan dan Permukiman Dinas Perumahan dan Permukiman

1	2	3	4	5	6
		<p>c. persentase turap perumahan dan permukiman dalam kondisi baik</p> <p>d. persentase berkurangnya dampak pencemaran lingkungan akibat limbah rumah tangga/domestik</p> <p>e. cakupan pelayanan air bersih diperdesaan</p> <p>f. persentase penerangan lingkungan perumahan dan permukiman dengan kondisi baik</p>	<p>%</p> <p>%</p> <p>SR</p> <p>%</p>	<p>panjang turap pengamanan perumahan dan permukiman yang terbangun</p> <p>jumlah lokasi sarana dasar yang dibangun</p> <p>jumlah sambungan perumahan air bersih</p> <p>jumlah titik lampu penerangan lingkungan permukiman yang dipasang</p>	<p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p> <p>Dinas Perumahan dan Permukiman</p>
2.	menurunnya jumlah rumah tidak layak huni	jumlah rumah tidak layak huni	unit	jumlah rumah di kabupaten garu dikurangi jumlah rumah tidak layak huni yang direhabilitasi	Dinas Perumahan dan Permukiman
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					
1.	terjaganya kualitas lingkungan hidup sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan	indeks kualitas air	point	$P_{ij} = \sqrt{\frac{(C_i/L_{ij})^2_M + (C_i/L_{ij})^2_R}{2}}$ <p>Keterangan: Lij = Konsentrasi Baku Peruntukkan Air (i) Ci = Konsentrasi Sampel Parameter Kualitas Air (i) Pij = Indeks Pencemaran Bagi Peruntukkan (i) (Ci/Lij)M = Nilai Maksimum dari Ci/Lij (Ci/Lij)R = Nilai Rata-rata dari Ci/Lij</p>	Dinas Lingkungan Hidup

1	2	3	4	5	6																															
				<table border="1"> <thead> <tr> <th data-bbox="248 999 280 1098">Status</th> <th data-bbox="248 849 280 999">Jumlah Sampel</th> <th data-bbox="248 687 280 849">Persct.</th> <th data-bbox="248 588 280 687">Koefisien</th> <th data-bbox="248 500 280 588">Nilai</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="280 999 392 1098">Memenuhi</td> <td data-bbox="280 849 392 999">Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Status Mutu Air Seluruh Sampel x 100%</td> <td data-bbox="280 687 392 849">=Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Jumlah Seluruh Sampel x 100%</td> <td data-bbox="280 588 392 687">70</td> <td data-bbox="280 500 392 588">=Persen x Koefisien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="392 999 488 1098">Ringan</td> <td data-bbox="392 849 488 999">Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan</td> <td data-bbox="392 687 488 849">=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan/Jumlah Seluruh Sampel x 100%</td> <td data-bbox="392 588 488 687">50</td> <td data-bbox="392 500 488 588">=Persen x Koefisien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="488 999 568 1098">Sedang</td> <td data-bbox="488 849 568 999">Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang</td> <td data-bbox="488 687 568 849">=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang/Jumlah Seluruh Sampel x 100%</td> <td data-bbox="488 588 568 687">30</td> <td data-bbox="488 500 568 588">=Persen x Koefisien</td> </tr> <tr> <td data-bbox="568 999 647 1098">Berat</td> <td data-bbox="568 849 647 999">Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat</td> <td data-bbox="568 687 647 849">=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat/Jumlah Seluruh Sampel x 100%</td> <td data-bbox="568 588 647 687">10</td> <td data-bbox="568 500 647 588">=Persen x Koefisien</td> </tr> <tr> <td colspan="5" data-bbox="647 500 727 1098">Nilai Indeks Pencemaran Ai.</td> <td data-bbox="647 500 727 588">Jumlah Nilai</td> </tr> </tbody> </table>	Status	Jumlah Sampel	Persct.	Koefisien	Nilai	Memenuhi	Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Status Mutu Air Seluruh Sampel x 100%	=Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	70	=Persen x Koefisien	Ringan	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan	=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	50	=Persen x Koefisien	Sedang	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang	=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	30	=Persen x Koefisien	Berat	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat	=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	10	=Persen x Koefisien	Nilai Indeks Pencemaran Ai.					Jumlah Nilai	<p>Dinas Lingkungan Hidup</p>
Status	Jumlah Sampel	Persct.	Koefisien	Nilai																																
Memenuhi	Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Status Mutu Air Seluruh Sampel x 100%	=Jumlah Sampel Kriteria Memenuhi/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	70	=Persen x Koefisien																																
Ringan	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan	=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Ringan/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	50	=Persen x Koefisien																																
Sedang	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang	=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Sedang/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	30	=Persen x Koefisien																																
Berat	Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat	=Jumlah Sampel Kriteria Cemar Berat/Jumlah Seluruh Sampel x 100%	10	=Persen x Koefisien																																
Nilai Indeks Pencemaran Ai.					Jumlah Nilai																															
2.	meningkatnya pengelolaan sampah	b. indeks kualitas udara	point	<p>tingkat pelayanan sampah (<i>Level of Service</i>) = (daya angkut sampah dibagi volume timbulan sampah wilayah pelayanan x 100%)</p>	Dinas Lingkungan Hidup																															
3.	terjaganya kelestarian dan fungsi lingkungan	Indeks vegetasi tutupan lahan	%	<p>(jumlah volume sampah yang diangkut ke TPA/jumlah volume timbulan sampah) x 100%</p> <p>konversi persentase yang merupakan perbandingan luas tutupan lahan dengan luas wilayah kabupaten</p> <p>1. Menghitung Persentase Tutupan Lahan/Hutan :</p> $TH = \frac{LTH}{LWK} \times 100\%$ <p>keterangan: TH : Tutupan Lahan/Hutan LTH : Luas Tutupan Lahan Berhutan LWK : Luas Wilayah Kabupaten</p>	Dinas Lingkungan Hidup																															

1	2	3	4	5	6
				2. menghitung nilai indeks tutupan lahan/hutan: $ITH = 100 - \left((84,3 - (TH \times 100)) \times \frac{50}{54,3} \right)$	Dinas Lingkungan Hidup
4.	meningkatkan kualitas ruang terbuka hijau	a. persentase taman/hutan kota dalam kondisi baik b. persentase Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang baik	% %	(jumlah taman/hutan kota dalam kondisi baik/jumlah taman kota/hutan kota) x 100% (jumlah TPU yang baik/jumlah TPU) x 100%	Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup
DINAS PERHUBUNGAN					
1.	meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pengguna jasa perhubungan	a. persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan b. persentase titik kemacetan yang teratasi c. persentase kapal nelayan yang laik layar	% % %	(jumlah kendaraan yang diuji pada tahun n dibagi jumlah kendaraan pada tahun n-1) x 100% jumlah lokasi titik rawan kemacetan yang teratasi pada tahun pengukuran di bagi target lokasi titik rawan kemacetan x 100 (%) jumlah kapal nelayan <7 GT yang laik layar (tersertifikasi) di bagi jumlah seluruh kapal <7GT yang terdata di kali 100%	Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan Dinas Perhubungan
2.	meningkatkan ketertiban dan keselamatan masyarakat dalam berlalu lintas	persentase menurunnya pelanggaran lalu lintas	%	jumlah angka pelanggaran lalu lintas pada tahun pengukuran dibagi target x 100	Dinas Perhubungan
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH					
1.	meningkatkan kapasitas ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana melalui upaya pencegahan dan kesiapsiagaan bencana	persentase kemampuan daerah dalam menghadapi bencana	%	jumlah wilayah yang memiliki kesiapsiagaan bencana/jumlah wilayah yang memiliki potensi rawan bencana x 100%	Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

1	2	3	4	5	6
2.	meningkatkan penanganan bencana secara cepat dan tepat melalui sistem jaringan yang terintegrasi	persentase penanganan kedaruratan bencana	%	jumlah bencana yang ditangani/jumlah kejadian bencana x 100%	Bidang Kedaruratan dan Logistik
3.	meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat terdampak bencana melalui perbaikan dan pembangunan kembali sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik	persentase perbaikan dan pembangunan sarana prasarana fisik dan pendampingan non fisik	%	jumlah sarana prasarana fisik dan non fisik yang diperbaiki/jumlah sarana prasarana fisik dan non fisik yang mengalami kerusakan x 100%	Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi
DINAS PEMADAM KEBAKARAN					
1.	meningkatkan lingkungan dan/atau kawasan berpotensi kebakaran yang siaga terhadap bahaya kebakaran	cakupan wilayah yang terproteksi bahaya kebakaran	%	luas wilayah yang terproteksi bahaya kebakaran/luas wilayah Kabupaten Garut x 100%	Dinas Kebakaran
2.	meningkatkan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran	a. persentase kejadian kebakaran yang tertangani b. persentase penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran dan non kebakaran yang dapat ditangani	%	jumlah kejadian kebakaran yang di tangani kurang dari 15 menit pada WMK/jumlah kebakaran pada WMK x 100%	Dinas Kebakaran
			%	jumlah laporan kejadian kebakaran yang ditangani/jumlah kebakaran keseluruhan di Kabupaten Garut	Dinas Kebakaran
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					
1.	tercapainya <i>e-government</i> sebagai wujud pelayanan prima	persentase jaringan komunikasi dan informatika antar SKPD yang terintegrasi	%	jumlah sistem aplikasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik yang telah terintegrasi/jumlah seluruh aplikasi pelayanan pemerintahan dan pelayanan publik x 100%	Bidang Informasi Komunikasi Teknologi Dan

1	2	3	4	5	6
2.	terwujudnya pelayanan informasi publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	kategori	nilai hasil survei atas layanan informasi	Bidang Informasi Komunikasi
3.	terwujudnya penyebar luasan informasi melalui multimedia dan media massa	persentase penyebarluasan informasi pementasan bagi masyarakat	%	(jumlah layanan informasi publik dan dokumentasi media <i>online</i> , cetak yang disampaikan pada tahun berjalan/jumlah informasi yang harus disampaikan) x 100 %	Bidang Pengelolaan Informasi dan Kehumasan
4.	terwujudnya peran serta masyarakat sebagai mitra penyebarluasan informasi	persentase masyarakat sebagai mitra Penyampai Informasi	%	jumlah forum/komunitas penyebarluasan informasi/jumlah forum/komunitas yang direncanakan x 100%	Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik
INSPEKTORAT					
1.	meningkatnya efektivitas pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Garut	a. persentase penurunan temuan audit SKPD yang menimbulkan adanya kerugian Negara/Daerah b. persentase rekomendasi hasil pengawasan internal dan <i>eksternal</i> yang selesai ditindaklanjuti c. persentase tindak lanjut Pengaduan Masyarakat (DUMAS) d. persentase SKPD yang telah menerapkan SPIP pada level terdefinisi e. persentase SKPD yang memiliki nilai evaluasi SAKIP B	%	(jumlah SKPD yang tidak mendapat temuan yang menimbulkan kerugian negara di bagi jumlah SKPD) x 100% (jumlah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi LHP dibagi jumlah SKPD mendapatkan rekomendasi temuan) x 100% jumlah DUMAS yang ditindaklanjuti dibagi jumlah DUMAS yang masuk x 100% jumlah SKPD yang telah menerapkan SPIP level terdefinisi dibagi jumlah SKPD yang ada) x 100% jumlah SKPD dengan nilai evaluasi SAKIP B keatas dibagi jumlah seluruh SKPD) x 100%	jumlah SKPD yang didapati adanya temuan yang berindikasi adanya kerugian negara/daerah SKPD yang telah menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan internal dan <i>eksternal</i> DUMAS: Pengaduan masyarakat yang diterima Inspektorat SKPD yang telah menerapkan SPIP Level Terdefinisi nilai evaluasi AKIP SKPD oleh Inspektorat minimal B

1	2	3	4	5	6
2.	meningkatkan kompetensi teknis dan kapabilitas APIP dalam penguasaan intern	a. persentase kompetensi APIP untuk setiap jenjang jabatan (Madya, Muda, Pertama) b. level kapabilitas APIP	% level	jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis substantif dan memperoleh sertifikat keahlian di bagi jumlah APIP x 100% hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP	jumlah APIP yang mengikuti diklat teknis substantif hasil penilaian kapabilitas APIP oleh BPKP
BAPPEDA					
1.	Terwujudnya keselarasan perencanaan pembangunan daerah	a. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	%	Tingkat Keselarasan RKPD terhadap RPJMD $= \frac{(Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6)}{6}$ $Ki_1 = \frac{\text{Jumlah Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$ $Ki_2 = \frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$ $Ki_3 = \frac{\text{Jumlah Target Sasaran pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$ $Ki_4 = \frac{\text{Jumlah Program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$	Bappeda

1	2	3	4	5	6
		<p>b. tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD</p>		<p>Jumlah Indikator Program pada RKP yang sesuai dengan RPJMD $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Indikator Program pada RPJMD</p> <p>Keselarasan Indikator Program = $\frac{\text{Jumlah Indikator Program pada RKP yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah Target Program pada RKP yang sesuai dengan RPJMD $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Target Program pada RPJMD</p> <p>Keselarasan Target Program = $\frac{\text{Jumlah Target Program pada RKP yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Tingkat Keselarasan Renstra terhadap RPJMD = $(Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6) / 6$</p> <p>Jumlah Sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Sasaran pada RPJMD</p> <p>Keselarasan Sasaran = $\frac{\text{Jumlah Sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah Indikator Sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD</p> <p>Keselarasan Sasaran = $\frac{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah Target Sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Target Sasaran pada RPJMD</p> <p>Keselarasan Target Sasaran = $\frac{\text{Jumlah Target Sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Sasaran pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Program pada RPJMD</p> <p>Keselarasan Program = $\frac{\text{Jumlah Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p> <p>Jumlah Indikator Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD $\times 100\%$</p> <p>Jumlah Indikator Program pada RPJMD</p> <p>Keselarasan Indikator Program = $\frac{\text{Jumlah Indikator Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RPJMD}} \times 100\%$</p>	Bappeda

1	2	3	4	5	6
		<p>c. tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD</p>		$Ki_6 \text{ Keselarasan Target Program} = \frac{\text{Jumlah Target Program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD}}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}} \times 100\%$ <p>tingkat Keselarasan Renja terhadap RKPD = $\frac{(Ki_1 + Ki_2 + Ki_3 + Ki_4 + Ki_5 + Ki_6)}{6}$</p> $Ki_1 \text{ Keselarasan Program pada Renja} = \frac{\text{Jumlah Program pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Program pada RKPD}} \times 100\%$ $Ki_2 \text{ Keselarasan Indikator Program pada Renja} = \frac{\text{Jumlah Indikator Program pada Renstra yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Indikator Program pada RKPD}} \times 100\%$ $Ki_3 \text{ Keselarasan Target Program pada Renja} = \frac{\text{Jumlah Target Program pada RKPD yang sesuai dengan Renja}}{\text{Jumlah Target Program pada RPJMD}} \times 100\%$ $Ki_4 \text{ Keselarasan Kegiatan pada Renja} = \frac{\text{Jumlah Kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Kegiatan pada RKPD}} \times 100\%$ $Ki_5 \text{ Keselarasan Indikator Kegiatan pada Renja} = \frac{\text{Jumlah Indikator Kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Indikator Kegiatan pada RKPD}} \times 100\%$ $Ki_6 \text{ Keselarasan Target Kegiatan pada Renja} = \frac{\text{Jumlah Target Kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD}}{\text{Jumlah Target Kegiatan pada RKPD}} \times 100\%$	Bappeda

1	2	c	4	5	6
		d. persentase perbandingan usulan aspiratif dan teknokratif yang telah masuk dalam dokumen perencanaan SKPD	%	(jumlah usulan aspiratif dan teknokratif yang ada dalam dokumen perencanaan dibagi Jumlah total usulan aspiratif dan teknokratif) x 100%	Bappeda
2.	meningkatkan pemanfaatan data dan informasi serta hasil penelitian dan pengembangan dalam perencanaan pembangunan daerah	a. persentase hasil kajian dokumen penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan untuk perumusan kebijakan b. persentase integrasi data capaian kinerja dalam sistem informasi pembangunan daerah	%	(jumlah dokumen hasil kajian penelitian dan pengembangan yang ditindaklanjuti/disepakati untuk dilaksanakan dibagi jumlah dokumen hasil kajian penelitian dan pengembangan yang telah disusun) x 100% (jumlah data kinerja yang terisi dalam sistem informasi pembangunan daerah dibagi jumlah data kinerja yang harus diisi dalam sistem informasi pembangunan daerah) x 100%	Bappeda Bappeda
3.	meningkatkan capaian kinerja pelaksanaan program pembangunan daerah	a. persentase pencapaian kinerja RPJMD b. persentase capaian kinerja program pembangunan	%	(indikator dalam RPJMD yang mencapai/melebihi target dibagi Jumlah total indikator dalam RPJMD) x 100% (jumlah program yang dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program yang direncanakan dalam RKPD) x 100%	Bappeda Bappeda
4.	meningkatkan akuntabilitas Bappeda	a. nilai evaluasi SAKIP Kabupaten b. nilai evaluasi SAKIP Bappeda c. persentase temuan hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti	Kategori Kategori %	sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah sesuai dengan Permenpan RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (temuan BPK/Inspektorat yang ditindaklanjuti dibagi seluruh jumlah temuan BPK/Inspektorat pada tahun berjalan) x 100%	Bappeda Bappeda Bappeda

1	2	3	4	5	6
SEKRETARIAT DAERAH					
1.	meningkatkan tata kelola/ sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	nilai LPPD	Nilai	nilai LPPD merupakan Indeks Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan (EKPPD) Tim Evaluasi atas LPPD tahun sebelumnya, yang dinilai berdasarkan indeks komposit dari dua variabel utama, yakni Indeks Capaian Kinerja (ICK) sesuai Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman EKPPD dan Indeks Kesesuaian Materi (IKM) sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang LPPD kepada Pemerintah, LKpj Kepala Daerah kepada DPRD dan ILPPD Kepada Masyarakat	Sekretariat Daerah
2.	meningkatkan tata kelola/ penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	persentase Kecamatan berkinerja baik	%	(jumlah Kecamatan berkinerja baik dibagi dengan jumlah Kecamatan yang ada di kabupaten Garut) x 100%	Bagian Tata Pemerintahan
3.	meningkatkan tata kelola/ sistem penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten dan Kecamatan	persentase kasus pertanahan yang difasilitasi	%	(jumlah kasus pertanahan yang terinventarisir pada tahun berjalan dibagi dengan jumlah kasus yang ditangani) x 100%	Bagian Tata Pemerintahan
4.	terpenuhinya kebutuhan kebijakan publik daerah, publikasi produk hukum dan penanganan permasalahan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah	persentase produk hukum daerah yang ditetapkan	%	(jumlah produk hukum yang ditetapkan di bagi dengan produk hukum yang diusulkan) x 100%	Bagian Hukum dan HAM
5.	meningkatkan kualitas pelayanan publik	persentase SKPD yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan	%	(jumlah SKPD yang melaksanakan survey kepuasan pelanggan dibagi jumlah SKPD yang ada di Kabupaten Garut) x 100%	Bagian Organisasi

1	2	3	4	5	6
6.	meningkatnya kualitas administrasi pembangunan	persentase paket pengadaan yang dilaksanakan melalui ULP	%	(jumlah paket pengadaan yang dilaksanakan melalui ULP dibagi dengan jumlah paket yang ada dalam SiRUP) x 100%	Bagian Administrasi Pembangunan/ULP
SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH					
1.	meningkatnya kualitas pelayanan dalam rangka memfasilitasi setiap kegiatan pimpinan dan anggota DPRD	kepuasan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Garut terhadap pelayanan Sekretariat DPRD dibanding jumlah anggota DPRD	%	(jumlah Dewan yang puas : jumlah Anggota DPRD) x 100%	penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD penyelenggaraan administrasi keuangan
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH					
1.	meningkatnya efisiensi dan efektifitas anggaran Daerah	a. persentase SKPD yang menyelesaikan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP b. persentase SKPD yang melaksanakan penyerapan anggaran minimal 90%	%	(jumlah SKPD dengan penyelesaian perencanaan anggaran tepat waktu dan sesuai SOP dibanding jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100 % (jumlah SKPD dengan realisasi ≥90% dibanding SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100%	Bidang Anggaran Bidang Perbendaharaan
2.	meningkatnya pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah	a. persentase SKPD yang menyampaikan laporan keuangan dan pengelolaan aset sesuai standar (SAP) dan tepat waktu b. persentase aset daerah yang terinventarisir	%	(jumlah laporan keuangan SKPD yang sesuai standar (SAP) dan tepat waktu dibanding jumlah SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Garut) x 100% (jumlah rincian total BMD di Simda barang dibagi data aset pada Neraca Pemerintah Kabupaten di Simda Keuangan (SIPKD)) x 100%	Bidang Akuntansi dan Pelaporan Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah

1	2	3	4	5	6
BADAN PENDAPATAN DAERAH					
1.	meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam memenuhi pembangunan daerah	persentase peningkatan pajak daerah dan retribusi daerah	%	jumlah wajib pajak daerah baru/wajib pajak daerah lama x 100 %	Persentase kenaikan pajak daerah dan retribusi daerah
BADAN KEPEGAWAIAN DAN DIKLAT					
1.	meningkatnya kompetensi Aparatur Sipil Negara melalui pendidikan dan pelatihan	persentase jabatan yang diisi sesuai dengan kompetensi jabatan	%	(jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensi dan kualifikasi dibagi jumlah pegawai yang ditempatkan) x 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat
2.	meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	persentase meningkatnya PNS yang terpenuhi pemberhentian dan tugas	%	jumlah PNS yang terpenuhi pemberhentian dan tugas/ jumlah seluruh PNS x 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat
3.	meningkatnya kinerja pegawai	persentase meningkatnya sumber daya aparatur berdasarkan kinerja	%	jumlah SDA berdasarkan kinerja/jumlah seluruh SDA x 100%	Badan Kepegawaian dan Diklat
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK					
1.	meningkatnya antipisasi terjadinya konflik	persentase penurunan kejadian terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat	%	(jumlah penurunan kejadian terkait politik, ekonomi, sosial, budaya dan ketertiban masyarakat) x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
2.	meningkatnya kesadaran berdemokrasi	persentase kesadaran politik masyarakat	%	(jumlah kesadaran politik masyarakat) x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
3.	meningkatnya kondusifitas kewilayahan di masyarakat	tingkat penyelesaian konflik	%	(jumlah tingkat penyelesaian konflik/jumlah konflik yang terjadi) x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik
4.	meningkatnya partisipasi masyarakat dalam wawasan kebangsaan	persentase organisasi kemasyarakatan yang aktif	%	(jumlah organisasi kemasyarakatan yang aktif/jumlah seluruh organisasi kemasyarakatan) x 100%	Badan Ketahanan Bangsa dan Politik

1	2	3	4	5	6
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA					
1.	meningkatnya penyelenggaraan pemerintahan Desa	persentase Desa berkinerja baik	%	jumlah desa berkinerja baik dibagi keseluruhan jumlah desa se-Kabupaten Garut x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
2.	meningkatnya peran masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa	a. persentase kontribusi swadaya murni masyarakat dalam membangun kewilayahan b. prosentase LPM Desa yang aktif c. prosentase kader posyandu aktif	%	jumlah swadaya murni masyarakat yang tertera di APBDes dibagi jumlah keseluruhan APBDes x 100% Jumlah LPM yang Aktif dibagi dengan jumlah keseluruhan Desa x 100% jumlah kader posyandu aktif dibagi jumlah keseluruhan kader posyandu x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
3.	meningkatnya kelembagaan kelompok usaha ekonomi perdesaan	a. prosentase kelompok usaha ekonomi produktif masyarakat yang aktif b. prosentase Desa memiliki BUMDes c. prosentase pasar Desa terfasilitasi	%	jumlah kelompok usaha ekonomi produktif yang ada di Desa dibagi jumlah keseluruhan Desa x 100% Jumlah desa yang sudah memiliki BUMDES dibagi jumlah keseluruhan Desa x 100% Jumlah pasar desa yang baik dan aktif di bagi jumlah keseluruhan pasar Desa x 100%	Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa
DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH KABUPATEN GARUT					
1.	meningkatnya minat baca masyarakat	persentase pemustaka, koleksi dan akses layanan pertahun	%	rata-rata prosentase pemustaka + prosentase koleksi + prosentase akses layanan	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
2.	meningkatnya arsip di lingkungan Pemerintah Daerah	persentase SKPD yang telah menerapkan aturan arsip secara baku	%	jumlah SKPD yang menerapkan arsip secara baku (dibina) : Jumlah SKPD x 100	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

1	2	3	4	5	6
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL					
1	meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan	<p>a. persentase penerbitan Kartu Keluarga</p> <p>b. persentase penduduk usia > 17 tahun atau sudah menikah yang memiliki KTP</p> <p>c. cakupan pelayanan penerbitan Akta Kelahiran</p> <p>d. cakupan pelayanan penerbitan Akta Kematian</p> <p>e. persentase validitas data kependudukan dan catatan sipil</p> <p>f. persentase pemanfaatan data dan dokumen kependudukan oleh SKPD</p>	%	<p>jumlah Kartu Keluarga yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penerbitan Kartu Keluarga x 100%</p> <p>jumlah KTP-el yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penerbitan KTP x 100%</p> <p>jumlah akta kelahiran yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penerbitan akta kelahiran x 100%</p> <p>jumlah akta kematian yang diterbitkan dibagi jumlah permohonan penerbitan akta kematian x 100%</p> <p>jumlah data kependudukan dan catatan sipil valid dibagi seluruh data kependudukan x 100%</p> <p>jumlah data yang dimanfaatkan SKPD dibagi seluruh data kependudukan x 100%</p>	<p>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk</p> <p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil</p> <p>Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan</p> <p>Bidang Pemanfaatan data dan Inovasi Pelayanan</p>
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA					
1	menurunnya pelanggaran perda terhadap produk hukum daerah	persentase penurunan pelanggaran terhadap produk hukum daerah	%	jumlah penanganan pelanggaran perda/jumlah pelanggaran Perda yang dilaporkan x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja
2	meningkatnya perlindungan ketertarikan dan kenyamanan masyarakat	<p>a. persentase Linmas yang aktif dan terlatih</p> <p>b. persentase fasilitas publik di zona merah berfungsi sesuai peruntukannya</p>	%	<p>jumlah linmas yang aktif dan terlatih/jumlah Linmas di Kabupaten Garut x 100%</p> <p>jumlah zona merah yang sudah diterbitkan/Jumlah zona merah x 100%</p>	<p>Satuan Polisi Pamong Praja</p> <p>Satuan Polisi Pamong Praja</p>

1	2	3	4	5	6
		c. persentase penanganan gangguan dan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	jumlah pelanggaran yang ditangani/jumlah pelanggaran x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja
KECAMATAN GARUT KOTA					
1.	meningkatnya ketepatan waktu pelayanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan masyarakat	%	hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25/2004 S)	Kec. Garut Kota
2.	meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah/Desa/Kelurahan	a. persentase pelayanan yang dapat ditindak lanjuti b. persentase kemasyarakatan yang ber-kriteria baik	%	(persentase pelayanan yang dilayani dibagi jumlah seluruh pelayanan yang belum dibayar) x 100% perbandingan antar jumlah lembaga kemasyarakatan yang memenuhi lembaga kemasyarakatan se-Kecamatan Garut Kota x 100 %	Kec. Garut Kota Kec. Garut Kota
KECAMATAN TAROGONG KIDUL					
1.	meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25/2004 S)	Kec. Tarogong Kidul
2.	meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	persentase Desa/Kelurahan yang berkinerja baik	%	jumlah Desa/Kelurahan yang berkinerja baik dibagi Jumlah seluruh Desa/Kelurahan x 100%	Kec. Tarogong Kidul

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	5	6
		c. persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	jumlah pelanggaran yang ditangani/jumlah pelanggaran x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja
KECAMATAN GARUT KOTA					
1.	meningkatnya ketepatan waktu pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan masyarakat	%	hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25/2004 S)	Kec. Garut Kota
2.	meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah/Desa/Kelurahan	a. persentase pelayanan yang dapat ditindak lanjuti b. persentase kemasyarakatan yang berkritera baik	%	(persentasi pelayanan yang dilayani dibagi jumlah seluruh pelayanan yang belum dibayar) x 100% perbandingan antar jumlah lembaga kemasyarakatan yang memenuhi lembaga kemasyarakatan se-Kecamatan Garut Kota x 100 %	Kec. Garut Kota Kec. Garut Kota
KECAMATAN TAROGONG KIDUL					
1.	meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25/2004 S)	Kec. Tarogong Kidul
2.	meningkatnya kualitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	persentase Desa/Kelurahan yang berkinerja baik	%	jumlah Desa/Kelurahan yang berkinerja baik dibagi Jumlah seluruh Desa/Kelurahan x 100%	Kec. Tarogong Kidul

BUPATI GARUT,

RUDY GUNAWAN

1	2	3	4	5	6
		c. persentase penanganan gangguan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat	%	jumlah pelanggaran yang ditangani/jumlah pelanggaran x 100%	Satuan Polisi Pamong Praja
KECAMATAN GARUT KOTA					
1.	meningkatnya ketepatan waktu pelayanan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) dalam pelayanan masyarakat	%	hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25/2004 S)	Kec. Garut Kota
2.	meningkatnya kualitas tata kelola Pemerintah/Desa/Kelurahan	a. persentase pelayanan yang dapat ditindak lanjuti b. persentase kemasyarakatan yang berkriteria baik	%	(persentasi pelayanan yang dilayani dibagi jumlah seluruh pelayanan yang belum dibayar) x 100% perbandingan antar jumlah lembaga kemasyarakatan yang memenuhi lembaga kemasyarakatan se-Kecamatan Garut Kota x 100 %	Kec. Garut Kota Kec. Garut Kota
KECAMATAN TAROGONG KIDUL					
1.	meningkatnya kualitas pelayanan publik	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	%	hasil survey kepuasan masyarakat (Permenpan RB 16/2014 dan SK Menpen No 25/2004 S)	Kec. Tarogong Kidul
2.	meningkatnya penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Kelurahan	persentase Desa/Kelurahan yang berkinerja baik	%	jumlah Desa/Kelurahan yang berkinerja baik dibagi Jumlah seluruh Desa/Kelurahan x 100%	Kec. Tarogong Kidul

BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN